

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Penegasan Istilah	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Penarikan Sampel	14
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Poligami	22
B. Dasar Hukum Poligami	27
1. Dasar Hukum Poligami dalam Islam	27
2. Dasar Hukum Poligami dalam Undang-Undang di Indonesia	35
3. Dasar Hukum Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	37
C. Alasan dan Syarat Poligami	38
1. Alasan Poligami	38
2. Syarat Poligami	40

D. Prosedur/Tata Cara Poligami	44
E. Dampak Poligami	47
BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	49
A. Profil Kecamatan Tersono.....	49
1. Kondisi Geografis.....	49
2. Kependudukan	50
3. Mata Pencarian	51
4. Pendidikan dan Agama	52
5. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tersono.....	53
B. Visi dan Misi Kecamatan Tersono	53
C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Syarat Poligami dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	55
BAB IV ANALISIS MENGENAI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. populasi	15
Tabel 4.1. Kondisi Geografis	49
Tabel 4.2. Kependudukan	50
Tabel 4.3. Mata Pencaharian	51
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.5. Agama	53
Tabel 4.6. Jenis Sarana & Prasarana	53
Tabel 4.7. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Poligami	55
Tabel 4.8. Pengetahuan Tokoh Masyarakat Tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	56
Tabel 4.9. Pendapat Para Tokoh Tentang Pasal-pasal yang Mengatur Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.....	57
Tabel 4.10. Pendapat Para Tokoh Tentang Undnag-Undang dan Peraturan yang dibuat Bertentangan dengan Peraturan agama	57
Tabel 4.11. Pendapat Para Tokoh Tentang Undang-Undang atau Peraturan Tersebut Mempersulit Kaum Lelaki untuk Berpoligami	59